

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN SEI RAMPAH**

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Sabila Amini
NPM : 2105170078
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 21 April 2025, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : SABILA AMINI
NPM : 2105170078
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Tugas Akhir : **PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN SEIRAMPAH**

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

PENGUJI I



(Dr. Hj. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si.)

PENGUJI II



(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.)

Pembimbing

Unggul | Cerdas | Terpercaya

(IRFAN, S.E., M.M., Ph. D.)

Ketua



Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E, M.M, M.Si. CMA) (Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.M, M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR ini disusun oleh :

Nama : SABILA AMINI
N.P.M : 2105170078
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Tugas Akhir : PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN SEI RAMPAH.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Maret 2025

Pembimbing Tugas Akhir

(IRFAN, S.E., M.M., Ph.D.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

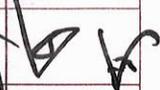
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CN

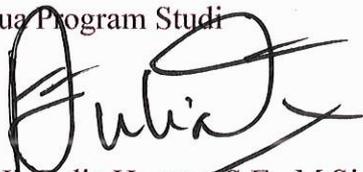
BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Sabila Amini
 NPM : 2105170078
 Dosen Pembimbing : Irfan, SE., M.M., Ph.D.
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
 Judul Penelitian : Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sei Rampah

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	Deskripsi data, analisis data perbedaan -	10/03-2025	
Bab 5	Keimpulan & Saran	10/03-2025	
Daftar Pustaka	modeling	13/03-2025	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	acc: Ridya Mepa Harta	13/03-2025	

Medan, Maret 2025

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanun, S.E., M.Si.)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing



(Irfan, S.E., M.M., Ph.D.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sabila Amini

NPM : 2105170078

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Manajemen

Dengan ini menyatakan bawah Tugas Akhir saya yang berjudul **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Sei Rampah”** adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

20
METERAI
TEMPEL
40AMX208938082

Sabila Amini

ABSTRAK

PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN SEI RAMPAH

Oleh:

Sabila Amini

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar di Kecamatan Sei Rampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 60 responden yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan staf operasional sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Hasil uji menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan dengan nilai t-hitung sebesar 7,360 dan akuntabilitas dengan nilai t-hitung sebesar 3,133. Selain itu, secara simultan, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana BOS dengan nilai F-hitung sebesar 24,545. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengelolaan dana pendidikan di Indonesia melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

ABSTRACT

THE EFFECT OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY ON MANAGEMENT OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE (BOS) FUNDS IN ELEMENTARY SCHOOLS IN SEI RAMPAH DISTRICT

By:
Sabila Amini

This study aims to analyze the effect of transparency and accountability on the management of School Operational Assistance (BOS) funds in elementary schools in Sei Rampah District. The method used in this research is quantitative with an associative approach, where data is collected through questionnaires distributed to 60 respondents consisting of school principals, treasurers, and school operational staff. The results showed that transparency and accountability have a positive and significant effect on the management of BOS funds. The test results indicate that transparency has a significant effect with a t-statistic value of 7.360 and accountability with a t-statistic value of 3.133. In addition, simultaneously, transparency and accountability significantly influence the management of BOS funds with an F-statistic value of 24.545. This research is expected to contribute to improving the management of educational funds in Indonesia through the application of transparency and accountability principles.

Keywords: Transparency, Accountability, Management of School Operational Assistance Funds (BOS)

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Sei Rampah”.

Dalam penyusunan tugas akhir ini peneliti banyak mendapatkan motivasi serta doa dari kedua orang tua peneliti, Bapak Drs. H. Sayuti Nur, M.Pd dan Ibu Jamilah, terimakasih atas apa yang telah diberikan kepada peneliti yang tidak bisa digantikan dan dibandingkan dengan apapun selamanya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri S.E., M.M, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E. M.Si** selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar S.E., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Irfan, SE.,M.M.,Ph.D** selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir tugas akhir.
8. Saudara kandung dan kakak ipar tersayang peneliti yang telah memberi segala dukungan, semangat, perhatian dan doa kepada peneliti.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam kelancaran dalam penelitian ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua, aamiin.

Demikin peneliti menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, peneliti sangat mengharapkan kritik dan. Akhir kata peneliti ucapkan banyak terima kasih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, April 2025
Penulis

SABILA AMINI
2105170078

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	12
2.1.2 Transparansi.....	20
2.1.3 Akuntabilitas	24
2.1.4 Penelitian Terdahulu	28
2.2. Kerangka Berpikir Konseptual	31
2.3 Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis penelitian	35
3.2 Defenisi Operasional	36
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian	36
3.4 Populasi Dan Sampel.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Hasil Penelitian.....	47
4.1.1 Deskripsi Data	47
4.2 Analisis Data	55
4.2.1. Analisis Model Pengukuran/ <i>Measurement Model Analysis (Outer Model)</i>	56
4.2.2 Analisis Model Struktural / <i>Structural Model Analysis (Inner Model)</i>	62
4.2.3 Pengujian Hipotesis	48
4.3. Pembahasan	68
4.3.1Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Bos	68
4.3.2Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Bos	71
4.3.3Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Bos	74
BAB V PENUTUP	78
5.1Kesimpulan.....	78
5.2Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	5
Tabel 1.2	6
Tabel 2.1	29
Tabel 3.1	36
Tabel 3.2	37
Tabel 3.3	40
Tabel 3.4	40
Tabel 3.5	40
Tabel 4.1	47
Tabel 4.2	48
Tabel 4.3	48
Tabel 4.4	49
Tabel 4.5	51
Tabel 4.6	53
Tabel 4.7	57
Tabel 4.8	59
Tabel 4.9	60
Tabel 4.10	60
Tabel 4.11	61
Tabel 4.12	62
Tabel 4.13	63
Tabel 4.14	64
Tabel 4.15	65
Tabel 4.16	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Konseptual.....	33
Gambar 4.1 Skema Penelitian Struktural SEM-PLS.....	57
Gambar 4.2 Hasil <i>Path Analysis</i>	66
Gambar 4.3 Uji F	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah pondasi penting dalam perkembangan individu dan masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian, sehingga mampu menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Di era globalisasi ini, pendidikan menjadi kunci untuk bersaing di tingkat internasional, membuka peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan berkualitas sangatlah penting untuk masa depan yang lebih baik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang terjangkau, yakni pemerintah mengeluarkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) merupakan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk berbagai keperluan operasional seperti pembelian bahan ajar, perbaikan fasilitas, pelatihan guru, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa, sehingga lebih banyak anak dapat memperoleh akses pendidikan yang layak. Program ini juga bertujuan untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan.

Sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib mampu mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di sediakan pemerintah dengan cara bertanggung jawab dan profesional untuk mendukung pendidikan yang berkualitas tinggi.

Menurut (Adisasmita, 2011a) arti pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah juga menegaskan untuk pihak sekolah agar melakukan pengupdatean data dalam sistem Data Pokok Pendidikam (DAPODIK)

dan mengoptimalkan pelaporan dana secara online. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarjana (2020) salah satu indikator pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tepat adalah taat aturan, artinya setiap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus berdasarkan aturan seperti dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) ataupun Juknis BOS.

Terdapat regulasi khusus yang mengatur peraturan terkait pengelolaan dan penyaluran dana BOS. Regulasi tersebut telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 01 Tahun 2018 tentang petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah terbaru menggantikan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 yang disahkan pada bulan Januari 2018, regulasi ini disebut dengan Juknis BOS.

Sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga dituntut untuk mengelola dana sekolah dengan baik dalam hal kemampuannya untuk melakukan perencanaan, mengalokasikan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana sekolah kepada pihak-pihak yang berwenang, yang berlandaskan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan diantaranya pengelolaan dana bantuan sekolah harus dilaksanakan secara transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan dana yang transparansi dan akuntabilitas, masyarakat akan mengetahui untuk apa saja dana yang telah disalurkan oleh pemerintah tersebut digunakan, dengan demikian pihak sekolah dapat mempertanggungjawabkan atas dana yang disalurkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. (Krina & Loina, 2003)

Masalah transparansi timbul karena informasi terkait tentang perencanaan, penyaluran serta penggunaan dana tidak jelas kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), hal ini dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan publik pada pengelolaan dana tersebut. Akuntabilitas terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana sering kali tidak memadai karena minimnya kemampuan pengelola sekolah dalam menciptakan akuntabilitas yang sesuai dengan standar.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), seperti transparansi dan akuntabilitas. Transparansi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan aspek penting dalam pengelolaan dana pendidikan di Indonesia. Transparansi ini bertujuan agar publik dapat dengan mudah mengakses informasi yang diinginkan dan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan oleh pemerintah digunakan secara efektif dan sesuai peruntukannya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga memperkecil risiko penyalahgunaan dana. Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya serta pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya (Minarti, 2011). Dana sekolah merupakan tanggung jawab sekolah dalam mengelolanya tetapi dengan prinsip transparansi dapat mengetahui apa yang telah dilakukan sekolah dengan dana tersebut dan manfaat yang dirasakan. (Waluyo, 2007).

Akuntabilitas Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sangat penting dan merupakan suatu kewajiban bagi pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatannya yang berkaitan dengan amanah yang telah diberikan. Dengan pendapat ini, pengelolaan dana

sekolah berarti harus dipertanggungjawabkan dengan baik melalui adanya publikasi sehingga dapat berdampak bagi masyarakat atau *stakeholders* (Shilvia, 2021).

Hasil penelitian (Mimi et al., 2023), dalam penelitiannya ditemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Karakteristik transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan sekolah yang berarti jika transparansi dan akuntabilitas diterapkan di sekolah sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah maka dapat dikatakan bahwa sekolah tersebut transparan dan akuntabel (Munandar, 2018)

Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, harus mengupayakan dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semua orang dan pihak-pihak yang terkait akan mendapatkan dampak positif dari penerapan prinsip-prinsip ini. Berikut ini dapat disajikan data penyaluran dana BOS ke sekolah dasar di Kecamatan Sei Rampah, yaitu:

Tabel 1.1
Data Sekolah Dasar Penerima Penyaluran Dana BOS

No	Nama Sekolah	Total Siswa	Jumlah Penyaluran Dana BOS
1	SD IT Bintang Sergai	177	Rp. 159.300.000,-
2	SD Muhammadiyah Sei Rampah	198	Rp. 178.200.000,-
3	SD R.A Kartini	300	Rp. 270.000.000,-
4	SD Alwasliyah Sei Rampah	182	Rp. 163.800.000,-
5	SD Alwasliyah 43 Firdaus	372	Rp. 334.800.000,-
6	SD Alwasliyah 47 Pem. Pelintahan	148	Rp. 133.200.000,-
7	SD Pesantren Alwasliyah Firdaus	158	Rp. 142.200.000,-
8	SD Alwasliyah 48 Cempedak Lobang	263	Rp. 236.700.000,-
9	SD IT An Nur Firdaus	66	Rp. 59.400.000,-
10	SD Negeri 105416 Sei Rejo	118	Rp. 106.200.000,-
11	SD Negeri 107450 Sei Rejo	141	Rp. 126.900.000,-

12	SD Negeri 102016 Sei Rampah	143	Rp. 128.700.000,-
13	SD Negeri 102017 Sei Rampah	129	Rp. 116.100.000,-
14	SD Negeri 102018 Sei Rampah	142	Rp. 127.800.000,-
15	SD Negeri 102019 Firdaus	210	Rp. 189.000.000,-
16	SD Negeri 102020 Firdaus	171	Rp. 153.900.000,-
17	SD Negeri 104302 Cempedak Lobang	158	Rp. 142.200.000,-
18	SD Negeri 102041 Firdaus	173	Rp.155.700.000,-
19	SD Negeri 105410 Rampah Pekan	247	Rp. 222.300.000,-
20	SD Negeri 105411 Pem. Pelintahan	193	Rp. 173.700.000,-

Sumber : Puslapdik Kemendikbud

Pada tabel di atas dapat disampaikan bahwa ada sebanyak 20 Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan Sei Rampah yang menerima bantuan dana BOS dari pemerintah sehingga diharapkan dana tersebut dapat digunakan dan dioptimalkan oleh pihak sekolah yang menerima bantuan tersebut. Namun dengan jumlah nominal penyaluran dana BOS yang telah diterima bukan berarti pihak sekolah tidak mempunyai masalah, justru dihadapkan dengan beberapa masalah seperti beberapa sekolah dasar menggunakan dana BOS tersebut tidak menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Hasil Survey Awal

No	Pertanyaan	Ya	Persen %	Tidak	Persen %
1.	Apakah pihak sekolah membuat informasi mengenai nominal dana BOS dan pembiayaan kegiatan pendidikan pada papan informasi?	4	20%	16	80%
2.	Apakah laporan pertanggungjawaban tersebut selalu dibuat tepat pada waktunya?	5	25%	15	75%
3.	Apakah dengan jumlah nominal yang diterima pihak sekolah kesulitan dalam melakukan pengelolaan dana BOS?	8	40%	12	60%

Sumber : Data primer diolah, 2024

Berdasarkan survey awal yang dilakukan kepada 20 sekolah dasar untuk mengetahui fenomena yang terjadi pada sekolah dasar di Kecamatan Sei Rampah. Dapat disimpulkan bahwa masih sering terjadi dan ditemukan bahwa dana BOS yang telah disalurkan ke pihak sekolah untuk membantu kelancaran biaya operasional sekolah belum mengoptimalkan prinsip transparansi, seperti mereka tidak menyampaikan kepada publik mengenai nominal bantuan yang telah disalurkan oleh pemerintah dan pembiayaan kegiatan pendidikan melalui website resmi ataupun papan informasi masing-masing sekolah. Apabila pembiayaan kegiatan pendidikan yang menggunakan dana BOS ditunjang dengan laporan pertanggungjawaban secara optimal serta disampaikan kepada masyarakat atau *stakeholder* dengan lisan maupun tulisan, maka pihak sekolah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat atau *stakeholder* (Shilvia, 2021)

Dalam hal akuntabilitas, beberapa sekolah dasar belum melakukan pertanggungjawaban dengan optimal yang dapat berdampak bagi kegiatan pengelolaan dana sekolah, dapat dilihat dengan pihak sekolah tidak tepat waktu dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Salah satu alasan tidak tepat waktu dalam membuat laporan pertanggungjawaban yaitu pihak sekolah kesulitan untuk menyesuaikan antara jenis pengeluaran yang dilakukan sekolah dengan pengeluaran yang diperbolehkan oleh Juknis BOS dan ada juga yang sudah mengeluarkan untuk hal tertentu tetapi jumlahnya dibatasi (Kompasiana.com, 2020)

Selanjutnya dapat dilihat dalam pengelolaan dana BOS di beberapa sekolah tersebut memang sudah mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Juknis BOS, tetapi masih banyak kebutuhan sekolah yang tidak dapat dipenuhi oleh dana

BOS tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh perencanaan dalam pengelolaan dana BOS seperti menetapkan langkah-langkah strategis untuk pembelanjaan pendidikan belum optimal. Proses pengelolaan dana BOS meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang baik agar dapat membantu ketercapaian tujuan dari program BOS tersebut (Syamsyul et al, 2024).

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa ada sejumlah pihak sekolah dasar di Kecamatan Sei Rampah tidak membuat transparansi dari pengelolaan dana BOS yang diterima dari penyaluran dana BOS yang disalurkan oleh pemerintah. Akibatnya tidak ada pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang dapat dipercaya dari penggunaan dana BOS dari pihak sekolah. Kondisi ini membuat pengelolaan dana BOS dari pihak sekolah tidak dilakukan dengan sistemasi serta akurat dan menjadi salah satu masalah yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat ataupun *stakeholders* terhadap pihak sekolah.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan dan dengan adanya kejadian yang ditemui di lapangan serta hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai, **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Sei Rampah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengambil masalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah dasar di Kecamatan Sei Rampah belum optimal melakukan perencanaan

dengan baik sehingga masih banyak kebutuhan sekolah yang tidak dapat dipenuhi oleh dana BOS.

2. Tingkat transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah yang menerima dana BOS dari pemerintah masih relatif rendah.
3. Ditemukan bahwa beberapa sekolah dasar di Kecamatan Sei Rampah belum optimal dalam membuat laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) selalu tepat pada waktunya.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini sangat diperlukan batasan masalah, karena luasnya objek yang dipilih, dan kurangnya kemampuan serta keterbatasan waktu. Maka penelitian ini akan diberikan batasan masalah agar tidak menimbulkan perluasan masalah, penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu membahas transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan dana BOS Reguler.

1.4 Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah bagi jalannya suatu penelitian, maka terlebih dahulu perlu dirumuskan hal yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah ada pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah dasar di Kecamatan Sei Rampah?

2. Apakah ada pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah dasar di Kecamatan Sei Rampah?
3. Apakah ada pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah dasar di Kecamatan Sei Rampah?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah dasar di Kecamatan Sei Rampah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah dasar di Kecamatan Sei Rampah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi dan akuntailitas terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah dasar di Kecamatan Sei Rampah.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta dapat menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh dengan dunia kerja.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan informasi bagi para sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikarenakan hasil penelitian ini dapat membantu sekolah dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara lebih transparan dan akuntabel. Serta penelitian ini membantu pemerintah dalam menganalisa program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

3. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan bahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang menganalisis faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan merupakan proses perbuatan mengelola, atau proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada segala hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan serta pencapaian tujuan (Pratama, 2012). Menurut (Adisasmita, 2011), arti pengelolaan sama dengan manajemen yakni menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut (Shilvia, 2021) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan yang diberikan pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

(Sarjana, 2020) mengatakan bahwa maksud dari tujuan Bantuan Operasional Sekolah adalah untuk membantu pelaksanaan program pendidikan yang bermutu dan terjangkau, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kualitas

dan akses pendidikan serta untuk meringankan beban biaya operasional terutama bagi siswa miskin pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Maka dapat disimpulkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu proses perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan serta pertanggungjawaban yang dilakukan sekolah penerima dana BOS untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara efisien dan efektif, mendukung kegiatan belajar mengajar, serta meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkompeten

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bentuk dari segala potensi yang terdapat pada manusia baik dalam pikiran, tenaga. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam sebuah organisasi, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS yang dapat dicapai (Eka N et al., 2024).

Hal ini diperkuat dalam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Sanjaya, 2017) menjelaskan bahwa sumber daya manusia berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. Kompetensi Pimpinan

Selain sumber daya manusia, kompetensi seorang pimpinan sekolah juga dapat mempengaruhi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kompetensi pimpinan adalah salah satu hal yang wajib dimiliki oleh seorang kepala sekolah dari kompetensi lainnya, dikarenakan meningkatnya mutu pendidikan di suatu sekolah tergantung kepala sekolah itu sendiri sebagai pengelola sekolah (Sudarman, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh (Suharizar, 2021) dengan hasil yang membuktikan bahwa adanya pengaruh kompetensi pimpinan sekolah terhadap pengelolaan dana BOS yaitu seorang kepala sekolah harus mampu menjadi pelaksana yang bijak, perencana program yang sukses serta dapat menjadi pengendali ketika terjadi kesalahan dalam terlaksananya program, dan wajib mampu dalam hal mempertahankan reputasi sekolah melalui fungsi manajemen tersebut.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam pengelolaan dana BOS dengan penerapan prinsip tersebut sekolah dapat dipercaya serta dapat meningkatkan mutu sekolah. Untuk mencapai tujuan sekolah, maka diperlukan upaya yang lebih dari sekolah salah satunya adalah dengan pengelola keuangan dana BOS yang baik dan menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dana BOS (Dani R, et al., 2022).

Hasil penelitian (Mimi et al., 2023), dalam penelitiannya membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Munandar, 2018) bahwa

karakteristik transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan sekolah yang berarti jika transparansi dan akuntabilitas diterapkan di sekolah sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah maka dapat dikatakan bahwa sekolah tersebut transparan dan akuntabel.

2.1.1.3 Fungsi Dasar Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut (Torang, 2016) fungsi dasar pengelolaan (manajemen) terbagi menjadi empat, yakni :

1. Perencanaan (*planning*)
2. Pengorganisasian (*organizing*)
3. Pengarahan (*actuating*)
4. Pengawasan (*controlling*)

Fungsi dasar pengelolaan tersebut bersifat umum didalam organisasi apapun. Oleh sebab itu, agar manajemen dalam organisasi tersebut dengan mudah mencapai tujuan secara efektif dan efisien maka seorang pemimpin organisasi harus sanggup menjalankan fungsi dasar pengelolaan tersebut.

1. Perencanaan (*planning*)

Terry (Torang, 2014) mengatakan bahwa : *'Planning is the selecting and relating of facts in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired result'*. Yang artinya perencanaan merupakan penetapan tindakan agar tercapainya suatu tujuan yang efektif dan efisien. Dan dapat diartikan bahwa perencanaan merupakan acuan, garis-garis pedoman kerja, persiapan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Menurut (Torang, 2016) perencanaan merupakan proses dari pendefinisian sasaran organisasi dan menetakan strategi untuk mencapai tujuan serta menyusun rencana lalu diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan aktivitas organisasi.

Menurut (Adisasmita, 2011c) dalam arti luas perencanaan merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun sistematis yang dimaksud disini agar kegiatan yang akan dilakukan menjadi tidak melenceng dari tujuan yang direncanakan.

Dengan kata lain perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan atau mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Manullang (Torang, 2016) berpendapat bahwa pengorganisasian merupakan pengelompokan aktivitas yang dilakukan dan fungsi kepada setiap orang yang berada dalam organisasi tersebut.

Menurut (Sasangka., 2014) pengorganisasian merupakan suatu aktivitas pengaturan terhadap sumber daya manusia serta sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah direncanakan agar tercapai tujuan. Sedangkan menurut (Nuryadin, 2012) pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi melalui sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang disekitarnya.

Menurut (Hasibuan, 2017) ada beberapa proses pengorganisasian, yakni sebagai berikut :

- a. Manajer wajib mengetahui tujuan organisasi yang dapat dicapai.

- b. Penentuan kegiatan, artinya manajer wajib mengetahui serta merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
- c. Pengelompokkan kegiatan, artinya manajer harus mengelompokkan kegiatan-kegiatan kedalam beberapa kelompok dengan tujuan yang sama.
- d. Penyerahan wewenang atau tugas, artinya manajer harus menetapkan besarnya wewenang atau tugas yang akan diserahkan kepada setiap bagian.
- e. Rentang kendali, artinya manajer harus menetapkan jumlah karyawan pada setiap bagian.
- f. Tugas perorangan, artinya manajer harus menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap orang karyawan, supaya tumpang tindih tugas dapat dihindarkan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan pengorganisasian adalah suatu proses penyusunan struktur organisasi yang searah dengan tujuan organisasi tersebut, sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang melingkupinya.

3. Pengarahan (*actuating*)

Menurut Sutarno (2004) pengarahannya merupakan rasa ingin untuk membuat oranglain mengikuti keinginannya dengan cara menggunakan kekuasaan jabatan atau kekuatan pribadi secara benar dan pada tempatnya untuk kepentingan jangka panjang perusahaan.

(Hasibuan, 2017) pengarahannya merupakan cara untuk membuat semua anggota agar mau bekerja sama secara ikhlas dan bersemangat untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Harold Koontz dan Cyril O Donnel (Melayu S.P Hasibuan, 2006) berpendapat bahwa pengarahannya merupakan hubungan antara aspek individu yang ditimbulkan karena adanya pengaturan

terhadap bawahan agar dapat dipahami dan pembagian kerja yang efektif untuk tujuan perusahaan.

Dapat disimpulkan pengarahan merupakan suatu proses pemberitahuan petunjuk dan intruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai rencana yang telah direncanakan.

4. Pengawasan (*controlling*)

Sujamto (Adisasmita, 2011) mengemukakan pendapat bahwa pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan kenyataan yang sebenarnya dan semestinya.

Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi (Fahmi, 2014). (Moekizat, 2014) berpendapat bahwa pengawasan merupakan hal yang dilakukan untuk melihat hasil pekerjaan dan menilai hasil pekerjaan tersebut agar hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Pengawasan yang merupakan bagian akhir dari fungsi manajemen menurut (Sutarno, 2006) dilaksanakan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu :

- a. Apakah semua kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. Apakah dalam pelaksanaan terjadi sebuah hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang;
- c. Apakah telah terjadi peningkatan efisien dan efektifitas organisasi;

Dapat disimpulkan dari pendapatan para ahli diatas arti pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan agar semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2.1.1.4 Indikator Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dalam penelitian yang dilakukan (Sarjana, 2020), pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Taat Aturan

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus berdasarkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku seperti dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) ataupun prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

2. Perencanaan

Perencanaan sangat penting dalam hal pengelolaan dana BOS karena dengan perencanaan dapat memastikan bahwa dana yang digunakan secara efisien, efektif serta sesuai dengan kebutuhan sekolah.

3. Pengawasan

Pengawasan berfungsi bagi setiap organisasi ataupun perusahaan untuk memenuhi bahwa aktivitas yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dapat berjalan seperti yang direncanakan (Hanum, 2019).

4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana BOS untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan perencanaan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan menghindari penyalahgunaan dana serta memastikan semua transaksi dapat dipertanggungjawabkan.

5. Evaluasi

Evaluasi berfungsi untuk memastikan dana yang telah disalurkan oleh pemerintah digunakan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Transparansi

2.1.2.1 Pengertian Transparansi

Transparansi adalah prinsip untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan penyelenggaraan, serta hasil yang dicapai. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan publik dengan melalui adanya penyediaan informasi serta menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang memadai (Sari, 2021).

Menurut (Minarti, 2011), transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi berkaitan dengan kejujuran. Dalam hal menyampaikan informasi, para pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satupun hal yang lupa dari pengetahuan penerima informasi dalam hal ini adalah masyarakat ataupun *stakeholder* (Hayati & Astuty, 2024).

Menurut (Tanjung, 2011) transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya

pada perundang-undangan. Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2019) transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai defenisi transparansi, dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah merupakan keterbukaan pihak sekolah kepada pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat terutama dalam manajemen keuangan yang sumber dananya dapat diketahui sebagai sumber informasi keuangan.

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi transparansi menurut (Nurul, et al., 2022), yaitu:

1. Keterlibatan Stakeholders

Keterlibatan stakeholders atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh seperti pihak sekolah, masyarakat, orang tua siswa serta pemerintah sangat penting dalam hal transparansi. Karena keterlibatan mereka sangat penting untuk menciptakan pengawasan tambahan, memastikan akuntabilitas serta mendorong sekolah untuk mengelola dana secara terbuka dan jujur.

2. Kejelasan Aturan

Kejelasan aturan dapat mempengaruhi transparansi karena dapat mencegah potensi penyalahgunaan dana. Ketika aturan rinci dan sanksi dijelaskan secara tegas, potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalisir dan apabila aturan yang tidak jelas dapat menciptakan celah bagi penyimpangan atau praktik yang kurang transparansi.

2.1.2.3 Tujuan Transparansi

Terdapat tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) ataupun lembaga, yaitu :

1. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.
2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
3. Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai universal.
4. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan- penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
5. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.

Dari tujuan transparansi yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi dalam pengelolaan keuangan seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat meminimalisir penyelewengan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik, dan tercapainya tujuan.

2.1.2.4 Manfaat Transparansi

Menurut (Minarti, 2011) manfaat dengan adanya transparansi dapat membuat kepercayaan tibal balik antara pemerintah, orang tua siswa dan masyarakat melalui penyediaan informasi serta menjamin kemudahan untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

(Kristianten, 2014) berpendapat bahwa transparansi akan memberikan dampak positif terhadap tata pemerintahan dan transparansi juga akan

meningkatkan pertanggungjawaban para perancang kebijakan sehingga kontrol kepada para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan dengan baik.

Adapun beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran menurut (Nico, 2007), yaitu :

1. Mencegah terjadinya korupsi
2. Meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
3. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha. kebijakan.
4. Menguatnya koneksi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
5. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu menilai kinerja lembaga.

2.1.2.5 Indikator Transparansi

Variabel Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator yakni sebagai berikut :

1. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Kejelasan dan kelengkapan informasi merupakan fondasi bagi transparansi yang efektif, dengan begitu akan mendukung hubungan yang sehat dan saling menguntungkan antara semua pihak.

2. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen adalah dokumen yang tersedia secara terbuka dan dapat diakses atau digunakan untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Kerangka Regulasi yang menjamin Transparansi

Kerangka regulasi adalah serangkaian aturan yang mengatur operasi dan perilaku lembaga tertentu. Dengan kerangka regulasi yang komprehensif (secara menyeluruh) transparansi dapat dijamin yang pada akhirnya mendukung akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

4. Keterbukaan

Keterbukaan sangat penting untuk membangun kepercayaan, meningkatkan partisipasi, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan publik.

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan organisasi atau lembaga untuk dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai umpan balik bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja organisasi atau lembaga tersebut dimasa yang akan datang (Nico, 2007). Akuntabilitas juga merupakan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik, (Fitriani S, 2021).

Sedangkan pendapat (Sujarweni, 2019) akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban seorang pimpinan untuk menjamin bahwa tugas yang dilakukannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut (Rambe, 2021) akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban seseorang maupun organisasi dalam memberikan suatu pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang telah dipercayakan padanya kepada pihak yang telah memberi amanah dan tentu saja memiliki wewenang dan hak dalam meminta pertanggungjawaban terserbut.

Menurut (Asmani, 2012) terdapat tiga pilar yang menjadi prasyarat terbentuknya akuntabilitas yakni sebagai berikut :

1. Adanya transparansi terhadap para penyelenggara sekolah dengan menerima pendapat dan mengikut sertakan berbagai komponen atau pihak yang berkepentingan dalam mengelola sekolah.
2. Adanya partisipasi untuk salaing membentuk suasana yang kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat yang baik dan biaya yang terjangkau.
3. Adanya kriteria kinerja, disetiap lembaga yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dapat disimpulkan dari beberapa pemaparan ahli diatas bahwa akuntabilitas merupakan keadaan yang dapat diminta mempertanggungjawabkan atas tugas yang dilakukan telah berjalan dengan baik. Dalam hal dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), akuntabilitas adalah penggunaan dana sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan, menyajikan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pemerintah serta orang tua siswa.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Dalam penelitian yang dilakukan (Nurhayati, 2023) terdapat 2 faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari dalam (internal) yaitu berupa ketersediaan sumber daya manusia baik dalam jumlah yang tersedia ataupun kualitas berupa kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak sekolah untuk mengelola dana BOS. Sumber daya manusia (SDM) yang memadai sudah pasti

akan semakin baik akuntabilitas mereka dalam hal keuangan public yang khususnya dana BOS (Aziiz, M. N., & Prastiti, 2019).

2. Faktor Eksternal

Faktor yang berasal dari luar (eksternal) yaitu berupa ketersediaan teknologi informasi. Teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana, dalam pemerintahan pada saat ini cenderung menerapkan sistem online. Hal itu berhubungan dengan sistem pengelolaan serta pelaporan dalam penggunaan dana BOS yang harus menggunakan aplikasi sehingga penggunaan atau ketersediaan teknologi informasi berdampak pada akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan dana BOS (Aziiz, M. N., & Prastiti, 2019).

2.1.3.3 Tujuan Akuntabilitas

Dalam penelitian yang dilakukan (Kiki, 2024) terdapat beberapa tujuan akuntabilitas, yakni sebagai berikut :

1. Menciptakan kepercayaan publik terhadap sekolah

Pengelolaan manajemen sekolah yang baik akan menimbulkan kepercayaan publik yang baik juga. Dengan begitu akan terciptanya kepercayaan publik selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan pihak sekolah.

2. Menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan

Melalui penilaian kinerja pihak sekolah dapat mengetahui seberapa baik mereka dalam mencapai tujuan sekolah dan menjelaskan serta mempertanggungjawabkan dari hasil pelayanan yang diberikan kepada publik.

3. Mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik

Dengan mempertanggungjawabkan komitmen, sekolah dapat mengukur seberapa baik mereka telah memenuhi janji tersebut, baik dalam hal kualitas pengajaran, fasilitas, maupun dukungan kepada siswa.

Adanya pemaparan mengenai tujuan akuntabilitas dalam hal pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dapat disimpulkan tujuannya adalah untuk menciptakan kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengelolaan keuangan, menetapkan tujuan serta menggunakan standard dalam proses pengelolaan keuangan dan tujuan kegiatan.

2.1.3.4 Manfaat Akuntabilitas

Manfaat akuntabilitas pada lembaga atau organisasi menurut (Waluyo, 2007), yaitu :

1. Dapat memelihara kepercayaan masyarakat.
2. Mendorong terciptanya transparansi.
3. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
4. Terciptanya suasana kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
5. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien dan efektif.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat akuntabilitas dapat menjamin kepercayaan publik, dapat terciptanya keterbukaan informasi, dan meningkatkan suasana kerja yang sehat dan kondusif.

2.1.3.5 Indikator Akuntabilitas

Dalam penelitian yang dilakukan (Adinda, dkk, 2022) terdapat indikator akuntabilitas dalam hal dana BOS, yakni :

1. Pengajuan anggaran berdasarkan aturan.

Setiap proses perencanaan dan pengajuan dana BOS harus mengikuti regulasi, kebijakan, dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Pelaksanaan belanja dengan prinsip efektif serta efisien.

Penggunaan dana BOS harus tepat sasaran dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan sekolah dan harus dilakukan dengan cara yang hemat, tidak boros, dan tetap mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Melakukan pengawasan.

Melakukan pengawasan berarti memastikan bahwa setiap proses dan penggunaan dana BOS dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS).

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah proses perencanaan penggunaan dana sekolah, termasuk dana BOS, untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan sekolah.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Review penelitian terdahulu sangat penting dilakukan peneliti, karena manfaatnya adalah untuk mengetahui apa saja yang telah dihasilkan dari peneliti sebelumnya. Adapun beberapa dari penelitian terdahulu yang membahas tentang

tema yang sama yaitu transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai berikut ;

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mimi Sintia Nodera, Ratih Kusumastuti, Salman Jumaili (2023)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMAN 7 Merangin Tahun 2021	Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 7 Merangin. Tranparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana BOS di SMAN 7 Merangin. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana BOS di SMAN 7 Merangin.
2	Hasrullah, Dara Ayu Nianty, Yuli Permatasari (2023)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamacinna	Pengelolaan dana BOS di MIM Tamacinna sudah cukup baik dan telah dilakukan semaksimal mungkin dalam menerapkan akuntabilitas, dalam hal perencanaan pengelolaan dana BOS sudah dilakukan dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah, dalam hal penggunaan dana BOS sudah berjalan dengan baik karena realisasi penggunaan dana BOS sesuai dengan RKAM yang telah disusun sebelumnya. Transparansi Pengelolaan dana BOS di MIM Tamacinna sudah malakukan penerapan transparansi misalnya dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah dalam perencanaan anggaran kegiatan sampai dengan pelaporannya.
3	Alsita Kusuma Ramadhani (2022)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD PADA Tingkat Kecamatan Pleret, Bantul, D.I Yogyakarta.	Akuntabiitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS penting. Trasparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS berguna. Komite organisasi efektivitas pengelolaan dana BOS bermanfaat.

4	(Shilvia, 2021)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Karakteristik Pengelola Keuangan Sekolah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bos (Studi Kasus Pada Seluruh SMP/MTsN Di Kabupaten Aceh Tenggara)	Transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Maksudnya, apabila pengelolaan dana BOS mengedepankan prinsip transparansi maka akan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS. Akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Maksudnya, apabila pengelolaan dana BOS dikelola dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas maka akan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS. Karakteristik pengelola keuangan sekolah tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Maksudnya, karakteristik pengelola keuangan sekolah belum bisa menjamin pengelolaan dana BOS akan dikelola secara efektif. Transparansi, akuntabilitas, dan karakteristik pengelola keuangan sekolah berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.
5	(Sarjana, & Yuni, 2022)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) (Studi Kasus Pada SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri)	Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Transparansi dan Akuntabilitas secara Bersamaan (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Slogohimo Kabupaten Wonogiri, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%

2.2 Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran dari pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, kerangka konseptual juga menjelaskan secara garis besar bagaimana alur berjalannya penelitian.

Penelitian ini menggunakan variabel independen (bebas/X) dan variabel dependen (terikat/Y). variabel independen dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Agar lebih detail maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Keterkaitan transparansi terhadap pengelolaan dana BOS

Transparansi membentuk pada kebebasan untuk mengakses segala aktifitas politik maupun ekonomi pemerintahan serta kebijakan-kebijakannya (Mardiasmo, 2011). Transparansi adalah kewajiban bagi setiap lembaga agar nilai lembaga juga meningkat. Keterbukaan informasi dan informasi yang disampaikan secara tepat waktu dan akurat merupakan perwujudan dari transparansi. Pengelolaan dana BOS akan baik apabila transparansi diterapkan sehingga terlihat jelas berapa nominal saluran dana BOS yang diberikan oleh pemerintah dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara optimal

Berdasarkan asumsi yang dibuat diatas peneliti mengharapkan variabel transparansi menunjukkan tingkat signifikan terhadap variabel terikat, artinya variabel transparansi berpengaruh positif terhadap variabel pengelolaan dana BOS.

2. Keterkaitan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana BOS

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi orang yang memegang amanah untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas serta kegiatan yang berkaitan dengan amanah yang diberikan. Pengelolaan dana BOS harus dipertanggungjawabkan dengan baik melalui dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang selalu dibuat tepat waktu sehingga akan berdampak baik pula pada kegiatan pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan asumsi yang dibuat diatas peneliti mengharapkan variabel akuntabilitas menunjukkan tingkat signifikan terhadap variabel terikat, artinya variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap variabel pengelolaan dana BOS.

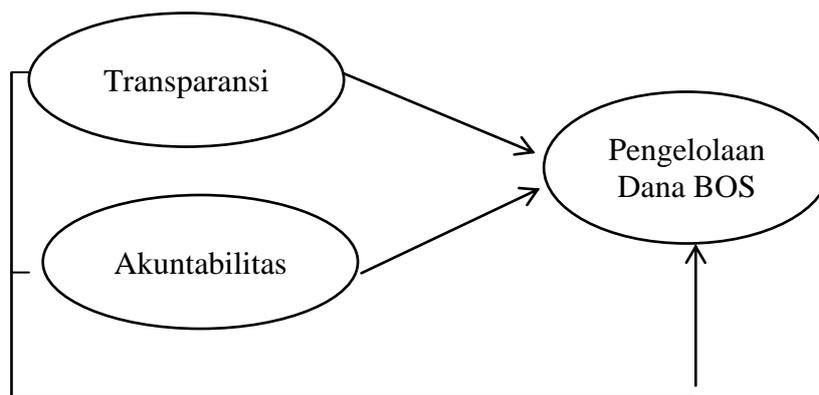
3. Keterkaitan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana BOS

Pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada segala hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan serta pencapaian tujuan (Aditya Bagus Pratama, 2012). Apabila suatu sekolah telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka akan dikatakan pengelolaan dana BOS sekolah tersebut telah dijalankan dengan baik.

Transparansi adalah kewajiban bagi setiap sekolah agar nilai sekolah tersebut juga meningkat. Keterbukaan informasi dan informasi yang disampaikan secara akurat dan tepat waktu merupakan perwujudan dari transparansi. prinsip transparansi mempunyai hubungan searah dengan efektivitas pengelolaan keuangan. Akuntabilitas adalah kewajiban bagi orang yang memegang amanah

untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas serta kegiatan yang berkaitan dengan amanah yang diberikan.

Ketika transparansi dan akuntabilitas diterapkan secara baik dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), setiap proses penggunaan anggaran menjadi lebih terbuka dan dapat diawasi oleh pihak terkait. Hal ini dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dalam mengelola dana tersebut untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas maka tingkat pengelolaan dana BOS semakin baik.



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir Konseptual

2.3 Hipotesis

Menurut (Juliandi, et al., 2014) hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah dalam penelitian, dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang ada adalah jawaban yang berasal dari teori.

1. Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD di Kecamatan Sei Rampah.

2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD di Kecamatan Sei Rampah.
3. Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD di Kecamatan Sei Rampah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan asosiatif, menurut (Irfan dkk, 2024) penelitian kuantitatif merupakan analisis data terhadap data-data yang mengandung angka-angka atau numerik tertentu. Sementara penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dan seberapa eratnya pengaruh atau hubungan itu. Penelitian ini untuk melihat Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sei Rampah. Penelitian ini menggunakan metode survei dari suatu populasi dengan mengandalkan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.

3.2 Defenisi Operasional

Operasional variabel merupakan sebuah konsep yang memiliki variasi nilai yang digunakan pada suatu penelitian dengan tujuan untuk menyatakan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi konsep serta mengurangi kesalahan dalam pengukuran dan pengamatan (Silalahi, 2012).

Defenisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Defenisi Operasional

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala Pengukuran
1	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) (Y)	Arti pengelolaan sama dengan manajemen yakni menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Balderton (2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taat Aturan 2. Perencanaan 3. Pengawasan 4. Pertanggungjawaban 5. Evaluasi 	Ordinal
2	Transparansi (X1)	Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. (Minarti, (2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan dan kelengkapan informasi 2. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen 3. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi 4. Keterbukaan 	Ordinal
3	Akuntabilitas (X2)	Sujarweni (2015) akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban seorang pimpinan untuk menjamin bahwa tugas yang dilakukannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. (Sujarweni, 2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan anggaran berdasarkan aturan. 2. Pelaksanaan belanja dengan prinsip efektif serta efisien. 3. Melakukan pengawasan. 4. Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS). 	Ordinal

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Swasta dan Negeri yang berada di Kecamatan Sei Rampah. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan september 2024 sampai dengan selesai.

Tabel 3.2
Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	September				Okt - Nov				Desember				Jan - Feb				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prariset	■																							
2	Pengajuan Judul		■	■																					
3	Pembagian Dospem				■																				
4	Penyusunan & Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■													
5	Pengajuan Seminar Proposal										■														
6	Seminar Proposal											■													
7	Penyempurnaan Proposal													■	■	■	■								
7	Pengumpulan dan Pegolahan Data														■	■	■	■							
8	Penyusunan & Bimbingan Skripsi														■	■	■	■	■						
9	Daftar Sidang Meja Hijau																					■			
9	Sidang Meja Hijau																						■		

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut (Juliandi, et al., 2014) populasi merupakan totalitas dari seluruh elemen yang ada dalam sebuah wilayah penelitian dengan adanya karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini populasinya adalah subjek yang terkait dengan penelitian yaitu terdiri dari seluruh kepala sekolah, bendahara, dan operasional pada 20 sekolah dasar di Kecamatan Sei Rampah yang berjumlah 60 responden.

3.4.2 Sampel

Menurut (Juliandi, et al., 2014) sampel merupakan wakil-wakil dari populasi. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh yang termasuk dalam *nonprobability sampling*. (Sugiyono, 2019) berpendapat bahwa, “*nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap populasi untuk dijadikan sampel”. Sampel jenuh merupakan teknik untuk pengambilan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, (Sugiyono, 2019).

Maka, sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi menjadi sampel yakni sejumlah 60 orang yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan operasional di Kecamatan Sei Rampah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang merupakan analisis data terhadap data-data yang mengandung angka-angka atau numerik tertentu, (Juliandi et al., 2015), Jenis data yang digunakan adalah data primer. Menurut (Juliandi et al., 2015), “Data primer merupakan data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri bukan oleh orang lain dari sumber utama untuk kepentingan penelitiannya dan data tersebut sebelumnya tidak ada”.

Suatu aktivitas penelitian membutuhkan data-data yang akan diolah, diuji dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang ada dibab 1 penelitian, ataupun membuktikan hipotesis penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian adalah suatu cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi

penelitian (Juliandi et al., 2015), Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kuisisioner/angket yang merupakan pertanyaan ataupun pernyataan yang telah disusun oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui pendapat responden penelitian tentang suatu variabel yang diteliti (Juliandi et al., 2015). Kuisisioner/angket ini digunakan untuk memperoleh data dari pihak kepala sekolah, bendahara sekolah dan komite/operasional sekolah.
2. Studi dokumentasi, merupakan studi tentang kumpulan data sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel seperti dokumen tertulis (jurnal, buku, dokumen, laporan) dan dokumen elektronik (internet, foto, mikrofilm, perangkat audio lainnya) (Irfan et al, 2024).

3.5.1 Instrumen Penelitian

Menurut (Arikunto, 2018) instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Pada penelitian ini instrument penelitian yang digunakan adalah angket/kuesioner. Skala pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Skala ordinal yang berupa Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut variabel penelitian.

Dalam melakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang akan diuji, pada setiap jawaban diberi skor (Sugiyono, 2017). Skala ordinal (Skala Likert) menggunakan lima tingkatan jawaban yang dapat berbentuk sebagai berikut:

Tabel 3.3
Skala Pengukuran

No	Skala	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Kurang Setuju (KS)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

NJI (Nilai Jenjang Interval) = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah Jumlah

Kriteria Pernyataan = Laba Skala = $5 - 1 = 4$

- Indeks Minimum : 1
- Indeks Maksimum : 5
- Interval : $5 - 1 = 4$
- Jarak Interval : $(5 - 1) : 5 = 0,8$

Tabel 3.4
Kategori Interval Skala Butir Pertanyaan

Interval Skala			Kategori
1,00	Sampai dengan	1,80	Sangat Tidak Setuju
1,81	Sampai dengan	2,60	Tidak Setuju
2,61	Sampai dengan	3,40	Kurang Setuju
3,41	Sampai dengan	4,20	Setuju
4,21	Sampai dengan	5,00	Sangat Setuju

Sumber: Sugiono (2016)

Adapun dalam menetapkan kategori reliabilitas dari variabel penelitian berdasarkan interval skala pada masing-masing variable dalam penelitian, dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Interval Reliabilitas Varibel Penelitian

Interval Skala			Kategori
0,80	Sampai dengan	1,00	Sangat Tinggi
0,60	Sampai dengan	0,79	Tinggi
0,40	Sampai dengan	0,59	Cukup
0,20	Sampai dengan	0,39	Rendah
0,00	Sampai dengan	0,19	Kurang

3.5.2 Uji Instrumen

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua uji tersebut digunakan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari pegawai/personil yang membidangi masalah keuangan dilingkungan Polda Sumatera Utara. Uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan pada responden yang menjawab kuesioner dan mengembalikan kuesioner. Adapun jumlah responden dalam uji coba instrument ini adalah sebanyak 60 responden yang diambil dari kepala sekolah, bendahara sekolah dan komite/operasional sekolah pada sekolah dasar di Kecamatan Sei Rampah.

a. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau ketepatan suatu alat ukur (Sugiyono, 2017). Teknik uji yang digunakan adalah teknik korelasi melalui koefisien korelasi *Product Moment*. Skor ordinal dari setiap item pernyataan yang diuji validitasnya dikorelasikan dengan skor ordinal keseluruhan item. Jika koefisien korelasi tersebut positif, maka item tersebut dinyatakan valid, sedangkan jika negative maka item tersebut tidak valid dan akan dikeluarkan dari kuisisioner atau diganti dengan pernyataan perbaikan.

Untuk mencari nilai validitas dari sebuah item kita akan mengkorelasikan skor item tersebut dengan total skor item-item dari variable tersebut. Apabila korelasi di atas 0,3 maka dikatakan item tersebut memberikan tingkat ke validan yang cukup, sebaliknya apabila nilai korelasi di bawah 0,3 maka dikatakan item

tersebut kurang valid. Metode korelasi yang digunakan adalah *person product moment* sebagai berikut:

1. Mendefinisikan secara operasional konsep yang diukur.
2. Melakukan uji coba skala pengukuran tersebut pada sejumlah responden.
3. Mempersiapkan table tabulasi jawaban.
4. Menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan rumus teknik korelasi product person yaitu:

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

(Juliandi et al., 2015 hal. 77)

Dimana:

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

$\sum X$ = Jumlah skor item

$\sum Y$ = Jumlah total skor jawaban

$\sum x$ = Jumlah kuadrat skor item

$\sum Y$ = Jumlah kuadrat total skor jawaban

$\sum XY$ = Jumlah perkalian skor jawaban suatu item dengan total skor

Angka yang diperoleh harus dibandingkan dengan standar nilai korelasi validitas, nilai standar dari validitas adalah sebesar 0,3 (nilai kritis). Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada nilai standar maka butir pertanyaan tersebut valid (signifikan) (Sugiyono, 2019).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauhmana suatu alat ukur dapat dipercaya (dapat diandalkan) atau dengan kata lain menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tersebut tetap konsisten jika dapat dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama Menurut (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pernyataan, Untuk uji reliabilitas digunakan metode *Alpha*, hasilnya bias dilihat dari nilai *Alpha Cronbach*, Hasil peneitian reliable terjadi apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda, Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama, Dimana instrument dibagi menjadi dua kelompok,

$$r = \frac{k}{k-1} \left[\frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

(Juliandi, *et al.*, 2015 hal, 82)

Keterangan:

r = Reliabilitas instrument

k = Banyaknya butir pernyataan

$\sum ab^2$ = Jumlah varians butir

σi^2 = Varians total

Kriteria penguji reliabilitas adalah nilai koefisien reliabilitas (*Cronbach Alpha*) $> 0,6$ maka kesimpulannya instrumen yang diuji tersebut adalah real (terpercaya) (Sugiyono, 2017).

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan PLS. PLS adalah model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut (I. & H. L. Ghazali, 2015), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian.

X1 : Transparansi

X2 : Akuntabilitas

Y : Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

3.6.1 Model Pengukuran atau Outer Model

Outer Model menganalisis hubungan konstruk (variabel laten) dan indikator Convergent validity dari model pengukuran dengan model refleksi indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan construct score yang dihitung dengan PLS untuk refleksi dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur

Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai Loading 5 sampai 0,60 dianggap cukup. Discriminant validity dari model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari pada konstruk lainnya

Model lain untuk menilai Discriminant validity adalah membandingkan nilai square root of Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan

kolerasi antara konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar dari pada nilai kolerasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik. Pengukuran ini digunakan untuk mengukur realibilitas component score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan composite reability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0,50.

Composite reability yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu internal consistency dan Cronbach's Alpha. Nilai yang diharapkan $> 0,6$ untuk semua konstruk (Ghozali, 2016). Analisa outer model ini dilakukan untuk memastikan *measurement* yang digunakan apakah layak untuk dijadikan pengukuran, yang artinya valid dan reliable.

3.6.2 Model Struktural atau Inner Model

Inner Model menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substansif. Model structural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen.

Pengujian hipotesis (hanya direct effect) –

1. Pengaruh X1 terhadap Y
2. Pengaruh X2 terhadap Y

Dengan menggunakan teknik analisis data yang akurat dan sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan maupun pengetahuan yang valid mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap

pengelolaan dana Bantuan Operasional (BOS) pada sekolah dasar di Kecamatan Sei Rampah.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini peneliti mengolah data dalam bentuk angket yang terdiri dari 8 pernyataan untuk variabel Transparansi (X1), 8 pernyataan untuk variable Akuntabilitas (X2), 10 Pernyataan untuk variabel Pengelolaan Dana Bos (Y). Angket yang disebar ini diberikan kepada 60 orang responden yaitu kepala sekolah, bendahara, operasional sekolah sebagai sampel penelitian dan dengan menggunakan Likert Summated Rating (LSR).

Tabel. 4.1. Skala Likert

Pilihan Jawaban	Skala Jawaban
1. Sangat setuju	5
2. Setuju	4
3. Kurang setuju	3
4. Tidak setuju	2
5. Sangat tidak setuju	1

Dan ketentuan di atas berlaku dalam menghitung variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan pernyataan untuk variabel Pengelolaan Dana Bos (Y)

4.1.1.1 Karakteristik Responden

Berikut ini adalah karakteristik responden yang ada pada Kepala sekolah, bendahara, operasional sekolah di SD Kecamatan Sei Rampah.

1. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	21	35%
2	Perempuan	39	65%
Jumlah		60	100%

Sumber : Data Primer diolah (2025)

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah laki-laki sebanyak 21 orang (35%) sedangkan perempuan sebanyak 39 orang (65%) dan. Maka dalam penelitian ini responden didominasi oleh jenis kelamin perempuan.

2. Data Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	21-30 tahun	-	-
2	31-40 tahun	7	11,7
3	41-50 tahun	23	38,3
4	> 50 tahun	30	50,0
Jumlah		60	100%

Sumber : Data Primer diolah (2025)

Dari data diatas diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini yaitu usia antara 21-30 tahun tidak ada, yang memiliki usia 31-40 tahun sebanyak 7 orang (11,7%), yang memiliki usia 41-50 tahun sebanyak 23 orang (38,3%), yang memiliki usia > 50 tahun sebanyak 30 orang (50,0%).

4.1.1.2 Analisis Variabel Penelitian

1. Transparansi (X1)

Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel transparansi yang dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden
Variabel Transparansi

No. Per	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	22	36.7	26	43.3	8	13.3	4	6.7	0	0	60	100%
2	9	15.0	36	60.0	14	23.3	1	1.7	0	0	60	100%
3	8	13.3	40	66.7	12	20.0	0	0	0	0	60	100%
4	9	15.0	35	58.3	16	26.7	0	0	0	0	60	100%
5	6	10.0	41	68.3	13	21.7	0	0	0	0	60	100%
6	14	23.3	36	60.0	9	15.0	1	1.7	0	0	60	100%
7	11	18.3	37	61.7	11	18.3	1	1.7	0	0	60	100%
8	11	18.3	29	48.3	19	31.7	1	1.7	0	0	60	100%

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2025)

Dari data tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Jawaban responden tentang Pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana BOS sudah memenuhi standar etika, nilai-nilai yang berlaku, dan prinsip administrasi yang benar, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 26 orang atau sebesar 43,3%,.
- 2) Jawaban responden tentang Pengajuan anggaran selalu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagian besar menjawab setuju sebanyak .36 orang sebesar 60%.
- 3) Jawaban responden tentang Pengelolaan dana BOS dilakukan secara ekonomis dan efisien, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 40orang sebesar66,7%..

- 4) Jawaban responden tentang Didalam pengadaan barang untuk menunjang fasilitas sekolah (terlepas dari kualitas suatu barang), pembelian barang dengan harga murah lebih signifikan dibandingkan dengan harga mahal, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 35 orang sebesar 58,3%.
- 5) Jawaban responden tentang Dilakukannya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana BOS, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 41 orang sebesar 68,3%.
- 6) Jawaban responden tentang Pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan laporan dana BOS yang bersih, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 36 orang sebesar 60%.
- 7) Jawaban responden tentang Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan RKAS dalam dana BOS sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 37 orang sebesar 61,7%.
- 8) Jawaban responden tentang Diberlakukannya suatu peraturan yang tegas terhadap setiap penyimpangan dalam penyusunan anggaran dana BOS, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 29 orang sebesar 31,7%.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki pandangan positif terhadap transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Tingginya persentase responden yang setuju pada berbagai aspek transparansi menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah telah dilakukan dengan mempertimbangkan etika, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi biaya, dan pengawasan yang ketat. Namun, tetap perlu diingat bahwa pengelolaan yang baik harus diimbangi dengan kualitas barang dan layanan yang diberikan. Untuk itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa dan sekolah.

2. Akuntabilitas (X2)

Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel Akuntabilitas yang dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden
Variabel Akuntabilitas

No. Per	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	32	53.3	27	45.0	1	1.7	0	0	0	0	60	100%
2	10	16.7	34	56.7	16	26.7	0	0	0	0	60	100%
3	10	16.7	44	73.3	6	10.0	0	0	0	0	60	100%
4	17	28.3	37	61.7	6	10.0	0	0	0	0	60	100%
5	11	18.3	38	63.3	11	18.3	0	0	0	0	60	100%
6	20	33.3	32	53.3	8	13.3	0	0	0	0	60	100%
7	17	28.3	19	31.7	19	31.7	4	6.7	1	1.7	60	100%
8	14	23.3	34	56.7	8	13.3	3	5.0	1	1.7	60	100%

Sumber : Hasil Penelitian Angket Tahun 2025

Dari data tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Jawaban responden tentang Pengambalian keputusan dalam pengelolaan dana BOS sudah memenuhi standar etika, nilai-nilai yang berlaku, dan prinsip administrasi yang benar, sebagian besar menjawab sangat setuju sebanyak 32 orang atau sebesar 53,3%.
- 2) Jawaban responden tentang Pengajuan anggaran selalu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku., sebagian besar menjawab setuju sebanyak 34 orang atau sebesar 56,7%.

- 3) Jawaban responden tentang Pengelolaan dana BOS dilakukan secara ekonomis dan efisien, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 44 orang atau sebesar 73,3%,
- 4) Jawaban responden tentang Didalam pengadaan barang untuk menunjang fasilitas sekolah (terlepas dari kualitas suatu barang), pembelian barang dengan harga murah lebih signifikan dibandingkan dengan harga mahal, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 37 orang atau sebesar 61,7%.
- 5) Jawaban responden tentang Dilakukannya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana BOS, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 38 orang atau sebesar 63,3%.
- 6) Jawaban responden tentang Pengawasan dilakukan secara efektif dana efisien untuk mewujudkan laporan dana BOS yang bersih, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 32 orang atau sebesar 53,3%..
- 7) Jawaban responden tentang Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan RKAS dalam dana BOS sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 19 orang atau sebesar 31,7%.
- 8) Jawaban responden tentang Diberlakukan suatu peraturan yang tegas terhadap setiap penyimpangan dalam penyusunan anggaran dana BOS, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 34 orang atau sebesar 56,7%.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki pandangan positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Tingginya persentase responden yang setuju dengan berbagai aspek akuntabilitas menunjukkan bahwa ada kesadaran dan komitmen untuk mengelola dana pendidikan secara transparan dan bertanggung jawab. Namun, masih ada beberapa

area yang perlu diperhatikan, seperti pengadaan barang dan pengawasan yang lebih ketat. Dengan meningkatkan akuntabilitas, diharapkan pengelolaan dana BOS dapat lebih efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan di Indonesia.

3. Pengelolaan Dana Bos (Y)

Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel Pengelolaan Dana Bos yang dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden
Variabel Pengelolaan Dana Bos

No. Per	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	25	41.7	33	55.0	1	1.7	1	1.7	0	0	64	100%
2	11	18.3	45	75.0	2	3.3	1	1.7	1	1.7	64	100%
3	5	8.3	45	75.0	10	16.7	0	0	0	0	64	100%
4	13	21.7	39	65.0	7	11.7	1	1.7	0	0	64	100%
5	7	11.7	44	73.3	9	15.0	0	0	0	0	64	100%
6	7	11.7	25	41.7	25	41.7	3	5.0	0	0	64	100%
7	12	20.0	41	68.3	7	11.7	0	0	0	0	64	100%
8	8	13.3	48	80.0	4	6.7	0	0	0	0	64	100%
9	11	18.3	46	76.7	3	5.0	0	0	0	0	64	100%
10	17	28.3	37	61.7	5	8.3	1	1.7	0	0	64	100%

Sumber : Hasil Penelitian Angket Tahun 2025

Dari data tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Jawaban responden tentang Pihak pengelola dana BOS telah mengikuti prosedur, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 33 orang atau sebesar 55%.
- 2) Jawaban responden tentang Dalam penyusunan laporan dana BOS dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 45 orang sebesar 75%.

- 3) Jawaban responden tentang Sekolah menyusun perencanaan penggunaan dana BOS sesuai kebutuhan prioritas sekolah, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 45 orang sebesar 75%.
- 4) Jawaban responden tentang Penyusunan rencana penggunaan dana BOS melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan pihak terkait lainnya, sebagian besar menjawab sangat setuju sebanyak 39 orang sebesar 65 %.
- 5) Jawaban responden tentang Sekolah memiliki mekanisme pengawasan yang jelas terhadap penggunaan dana BOS, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 44 orang sebesar 73,3%.
- 6) Jawaban responden tentang Jika ditemukan penyimpangan dalam pengawasan pengelolaan dana BOS, tindakan korektif segera dilakukan, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 25 orang sebesar 41,7%.
- 7) Jawaban responden tentang Kepala sekolah dan bendahara bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana BOS, sebagian besar menjawab sangat setuju sebanyak 41 orang sebesar 68,3%.
- 8) Jawaban responden tentang Sekolah selalu menyampaikan laporan penggunaan dana BOS secara tepat waktu kepada pihak terkait, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 48 orang sebesar 80%.
- 9) Jawaban responden tentang Sekolah secara rutin melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan efektivitasnya, sebagian besar menjawab sangat setuju sebanyak 46 orang sebesar 76,7%.
- 10) Jawaban responden tentang Guru serta komite sekolah dilibatkan dalam mengevaluasi pengelolaan dana BOS, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 37 orang sebesar 61,7%.

Dari analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah yang diteliti menunjukkan hasil yang positif. Mayoritas responden memiliki pandangan yang baik terhadap prosedur, penyusunan laporan, dan perencanaan penggunaan dana yang dilakukan. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengelolaan dana BOS juga menjadi salah satu faktor kunci yang mendukung keberhasilan pengelolaan tersebut. Meskipun masih terdapat tantangan, seperti dalam hal pengawasan dan tindakan korektif, responden umumnya menunjukkan sikap yang optimis terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah.

4.2 Analisis Data

Berdasarkan data hasil kuesioner yang telah disajikan maka data kualitatif kuesioner tersebut dijadikan data bentuk kuantitatif berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun data kuantitatif tersebut merupakan data mentah dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. Dalam bagian ini, data-data yang telah dideskripsikan dari data-data sebelumnya yang merupakan deskripsi data akan dianalisis.

Terdapat dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu analisis model pengukuran (outer model), yakni realibilitas dan validitas konstruk (*construct reliability and validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*). Selanjutnya analisis model struktural (inner model), yakni koefisien determinasi (R-square); F-square; pengujian hipotesis yakni pengaruh langsung (*direct effect*), pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dan *total effect* (Juliandi, 2018). Dalam metode (*Partial Least Square*) PLS teknik analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut:

4.2.1. Analisis Model Pengukuran/*Measurement Model Analysis (Outer Model)*

Outer model sering juga disebut (*outer relation* atau *measurement model*) yang mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Model pengukuran (*outer model*) digunakan untuk menilai validitas dan realibilitas model. Cooper dan Schindler (Abdillah & Jogiyanto, 2015) menjelaskan bahwa uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrument penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur dan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pernyataan dalam kuesioner atau instrument penelitian. Analisis model pengukuran *measurement model analysis* menggunakan 2 pengujian, yaitu : realibilitas dan validitas konstruk (*construct reliability and validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*).

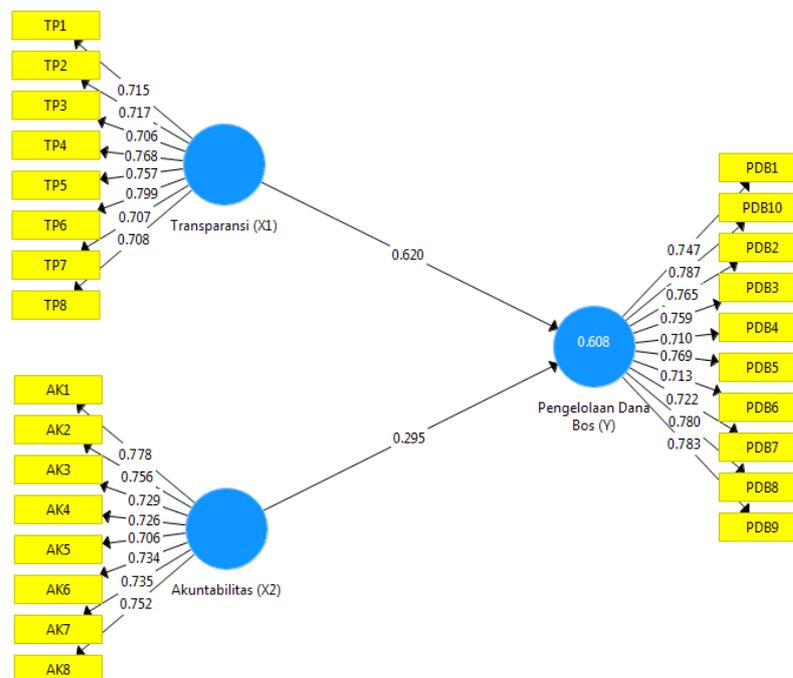
4.2.1.1 Analisis *Outer Model*

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis PLS memerlukan 2 tahap untuk menilai fit model dari sebuah model penelitian (Ghozali). Salah satunya adalah analisis *outer model*. Analisis *outer model* digunakan untuk menguji pengukuran yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran yang valid. Ada beberapa indikator dalam analisis *outer model*, diantaranya *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*.

a. *Convergent Validity*

Convergent validity dari sebuah model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score* atau *component score*

dengan *construct score* pada *Loading Factor* yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,5 dengan konstruk yang ingin diukur. Berikut adalah gambar hasil kalkulasi model SEM PLS.



Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Gambar 4.1 Skema Penelitian Struktural SEM-PLS

Hasil pengolahan dengan SmartPLS 3.00 dapat dilihat pada gambar 4.1 nilai *outer model* antara konstruk dengan variabel sudah memenuhi *convergent validity* karena indikator memiliki nilai validitas diatas 0,7. Pada gambar 4.1 menunjukkan nilai korelasi variable Transparansi, Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana Bos menunjukkan bahwa nilai diatas berada di atas 0,7 sehingga konstruk untuk beberapa variabel ada yang harus tidak ada yang dieleminasi dari model.

Tabel 4.7
Outer Loadings

	Akuntabilitas (X2)	Pengelolaan Dana Bos (Y)	Transparansi (X1)
AK1	0.778		
AK2	0.756		
AK3	0.729		

AK4	0.726		
AK5	0.706		
AK6	0.734		
AK7	0.735		
AK8	0.752		
PDB1		0.747	
PDB10		0.787	
PDB2		0.765	
PDB3		0.759	
PDB4		0.710	
PDB5		0.769	
PDB6		0.713	
PDB7		0.722	
PDB8		0.780	
PDB9		0.783	
TP1			0.715
TP2			0.717
TP3			0.706
TP4			0.768
TP5			0.757
TP6			0.799
TP7			0.707
TP8			0.708

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian validitas *outer loading* di atas diperoleh hasil bahwa pengujian yang dilakukan pada 60 orang responden diperoleh hasil bahwa semua item pernyataan memenuhi standar validasi dengan nilai di atas 0.7 sehingga item pernyataan memenuhi standar validasi.

4.2.1.2 Discriminant Validity

Pada bagian ini akan diuraikan hasil uji *discriminant validity*. Uji *discriminant validity* menggunakan nilai *cross loading*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi discriminan validity apabila nilai *cross loading* indikator

pada variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan dengan variabel lainnya (ghozali). Berikut adalah nilai *cross loading* pada masing-masing indikator:

Tabel 4.8
Cross Loading

	Akuntabilitas (X2)	Pengelolaan Dana Bos (Y)	Transparansi (X1)
AK1	0.778	0.015	0.007
AK2	0.756	0.066	0.070
AK3	0.729	0.467	0.287
AK4	0.726	0.188	0.275
AK5	0.706	0.321	0.187
AK6	0.734	0.234	0.137
AK7	0.735	0.152	0.112
AK8	0.752	0.303	0.252
PDB1	0.270	0.447	0.252
PDB10	0.042	0.787	0.364
PDB2	0.333	0.765	0.204
PDB3	0.530	0.759	0.302
PDB4	0.259	0.710	0.465
PDB5	0.012	0.769	0.327
PDB6	0.325	0.713	0.121
PDB7	0.341	0.722	0.564
PDB8	0.371	0.780	0.647
PDB9	0.300	0.783	0.444
TP1	0.200	0.180	0.715
TP2	0.339	0.453	0.717
TP3	0.178	0.485	0.706
TP4	0.174	0.119	0.768
TP5	0.085	0.372	0.757
TP6	0.103	0.495	0.799
TP7	0.303	0.507	0.707
TP8	0.297	0.236	0.708

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025

Berdasarkan data Tabel 4.5 diketahui bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *cross loading* terbesar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai *cross loading* pada variabel lainnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dinyatakan bahwa indikator-

indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing.

4.2.1.3 Construct Reliability and Validity

Validitas dan reliabilitas konstruk adalah pengujian untuk mengukur kehandalan suatu konstruk. Kehandalan skor konstruk harus cukup tinggi. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur (Abdillah & Jogiyanto, 2015 Hal 32).

Uji reliabilitas konstruk dapat dilihat dari nilai *Cronbach's alpha* dan nilai *composite reliability*. Untuk dapat dikatakan suatu item pernyataan reliabel, maka nilai *Cronbach's alpha* dan *composite reliability* harus $> 0,6$. Berikut ini hasil pengujian *Cronbach's alpha*.

Tabel 4.9
Hasil Cronbach's Alpha

	Cronbach's Alpha
Akuntabilitas (X2)	0.779
Pengelolaan Dana Bos (Y)	0.714
Transparansi (X1)	0.888

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa konstruk reliabilitas pada *Cronbach Alpha* telah memenuhi kriteria yang nilainya diatas 0,6. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan variabel Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengelolaan Dana Bos memenuhi asumsi pengujian reliabilitas. Berikut ini hasil pengujian *composite reliability*.

Tabel 4.10
Hasil Composite Reliability

	Composite Reliability
Akuntabilitas (X2)	0.710
Pengelolaan Dana Bos (Y)	0.795
Transparansi (X1)	0.725

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa konstruk reliabilitas pada *Composite Reliability* telah memenuhi kriteria yang nilainya diatas 0,6. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan variabel Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengelolaan Dana Bos memenuhi asumsi pengujian reliabilitas.

4.2.1.4 *Discriminant Validity*

Ghozali (2013 Hal 212) menyatakan bahwa validitas diskriminan adalah sebagai suatu ujian dapat melakukan untuk diukur perbedaan dari dua variabel yang kemiripan dengan konseptual. Validitas diskriminan di nilai berdasarkan nilai AVE dengan korelasi antar konstruk atau variable laten. Variabel laten dikatakan memiliki validitas diskriminan yang tinggi jika nilai AVE (*Average Variance Extracted*) direkomendasikan $\geq 0,5$.

Tabel 4.11
Hasil Pengujian *Average Variance Extracted*

	Average Variance Extracted (AVE)
Akuntabilitas (X2)	0.557
Pengelolaan Dana Bos (Y)	0.795
Transparansi (X1)	0.587

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Average Variance Extracted* telah memenuhi kriteria yang nilainya lebih dari 0,3. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian memenuhi kriteria pengujian validitas diskriminan dan variabel Transparansi, Akuntabilitas , dan Pengelolaan Dana Bos telah memenuhi asumsi pengujian validitas diskriminan.

Validitas diskriminan bertujuan untuk menilai suatu indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak, yakni dengan cara melihat Nilai

Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation (HTMT) < 0,90, maka variabel memiliki validitas diskriminan yang baik (valid) (Hair Jr et al., 2017).

Tabel 4.12
Validitas Diskriminan

	Akuntabilitas (X2)	Pengelolaan Dana Bos (Y)	Transparansi (X1)
Akuntabilitas (X2)			
Pengelolaan Dana Bos (Y)	0.739		
Transparansi (X1)	0.668	0.779	

Sumber : SEM PLS (2025)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) maka

1. Variabel *Transparansi* dengan Pengelolaan Dana Bos sebesar $0,779 < 0,900$, korelasi variabel *Heterotrait-Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT). Variabel *Transparansi* dengan Akuntabilitas sebesar sebesar $0,668 < 0,900$ korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT). Dengan demikian seluruh nilai korelasi *Transparansi* dinyatakan valid.
2. Nilai korelasi *Heterotrait - Monotrait Ratio Of Corelation* (HTMT) variabel Akuntabilitas dengan Pengelolaan Dana Bos sebesar $0,739 < 0,900$ dengan demikian seluruh nilai korelasi dinyatakan valid.

4.2.2 Analisis Model Struktural / *Structural Model Analysis (Inner Model)*

Analisis model structural menggunakan 3 pengujian, antara lain: *R-Square*; *F-Square* dan *Hypothesis Test*: Berikut ini hasil pengujiannya:

4.2.2.1 Hasil *R-Square*

Kriteria dari *R-Square* adalah:

1. Jika nilai (adjusted) = 0.75 → model adalah substansial (kuat);
2. Jika nilai (adjusted) = 0.50 → model adalah moderate (sedang);
3. Jika nilai (adjusted) = 0.25 → model adalah lemah (rendah)

Tabel 4.13
Hasil Uji *R-Square*

	R Square	R Square Adjusted
Pengelolaan Dana Bos (Y)	0.608	0.594

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel diatas mengenai hasil pengujian nilai *R-Square adjust* diperoleh hasil bahwa model jalur adalah 0,594. Dengan kata lain kemampuan variabel X yaitu Transparansi dan, Akuntabilitas dalam menjelaskan vaiabel Y yaitu Pengelolaan Dana Bos adalah sebesar 59,4% dengan demikian model tergolong substansial (sedang).

4.2.2.2 Hasil Uji *F-Square*

Pengukuran *F-Square* atau *effect size* adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relative dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Pengukuran (*F-square*) disebut juga efek perubahan, perubahan nilai saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model, akan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak substansif pada konstruk endogen (Juliandi, Manurung, & Sastriawan, 2016).

Kriteria F-Square yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai = 0.02 → Efek yang rendah dari variabel eksogen terhadap endogen.
2. Jika nilai = 0.15 → Efek yang sedang dari variabel eksogen terhadap endogen.
3. Jika nilai = 0.35 → Efek yang tinggi dari variabel eksogen terhadap endogen.

Tabel 4.14
Hasil *F-Square*

	Akuntabilitas (X2)	Pengelolaan Dana Bos (Y)	Transparansi (X1)
Akuntabilitas (X2)		0.191	
Pengelolaan Dana Bos (Y)			
Transparansi (X1)		0.845	

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel diatas mengenai nilai *F-Square* diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel Transparansi (X1) terhadap Pengelolaan Dana Bos (Y) memiliki nilai 0,845 maka efek yang tinggi dari variabel eksogen terhadap endogen.
2. Variabel Akuntabilitas (X2) terhadap Pengelolaan Dana Bos (Y) memiliki nilai 0,191 maka efek yang sedang dari variabel eksogen terhadap endogen.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian ini adalah untuk menentukan koefisien jalur dari model struktural. Tujuannya adalah menguji signifikansi semua hubungan atau pengujian hipotesis. Pengujian Hipotesis mengandung tiga analisis, antara lain: direct effect, indirect effect dan total effect.

4.2.3.1. Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Tujuan analisis direct effect (pengaruh langsung) berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) (Juliandi, 2018). Kriteria untuk pengujian hipotesis pengaruh langsung (direct effect) adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai koefisien jalur (*path coefficient*) adalah positif, maka pengaruh

suatu variabel terhadap variabel lain adalah searah, jika nilai nilai suatu variabel meningkat/naik, maka nilai variabel lainnya juga meningkat/naik.

2. Jika nilai koefisien jalur (*path coefficient*) adalah negatif, maka pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain adalah berlawanan arah, jika nilai nilai suatu variabel meningkat/naik, maka nilai variabel lainnya akan menurun/rendah.

Nilai probabilitas/signifikansi (P-Value): jika nilai P-Values < 0.05 , maka signifikan dan jika nilai P- Values > 0.05 , maka tidak signifikan (Juliandi et al., 2014).

Tabel 4.15

Hasil Koefisien Jalur Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

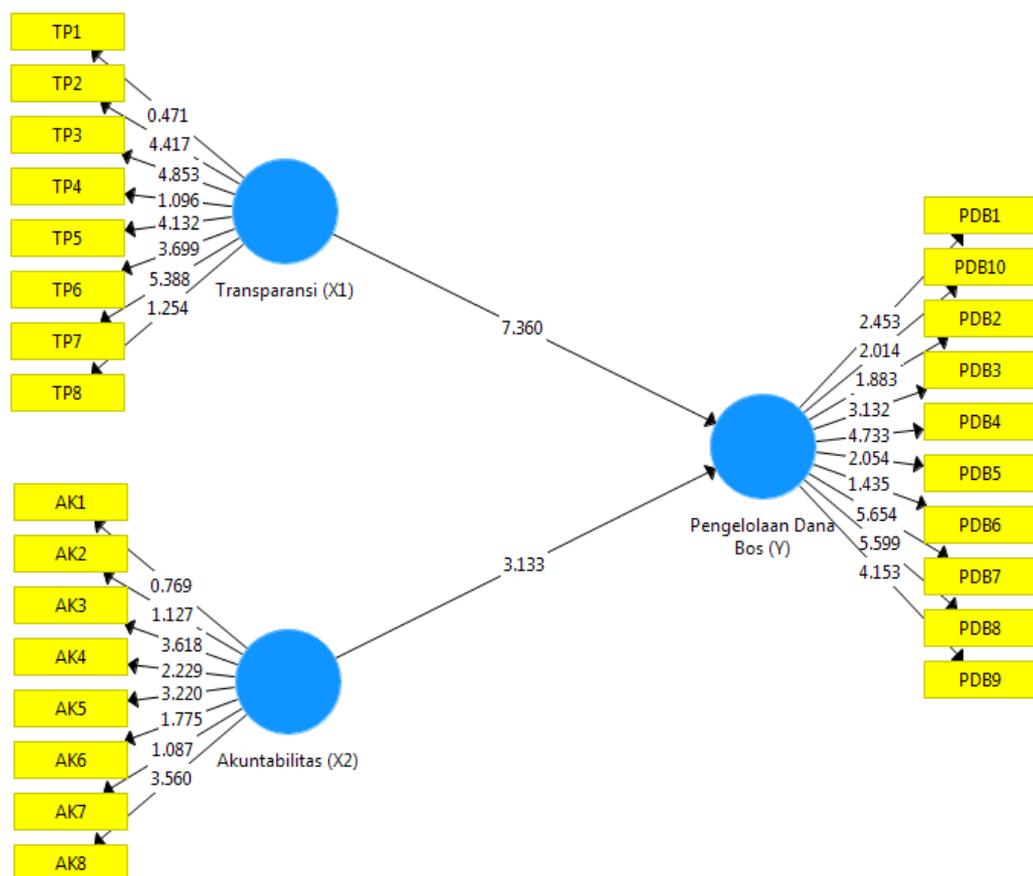
	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Akuntabilitas (X2) -> Pengelolaan Dana Bos (Y)	0.295	0.320	0.094	3.133	0.002
Transparansi (X1) -> Pengelolaan Dana Bos (Y)	0.620	0.617	0.084	7.360	0.000

Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel diatas mengenai hasil koefisien jalur (*path coefficient*) diperoleh hasil bahwa seluruh nilai koefisien jalur adalah positif (dilihat pada *T-statistic*), antara lain:

1. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Bos mempunyai koefisien jalur sebesar 0,620. Hasil ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi Transparansi, maka semakin tinggi pula Pengelolaan Dana Bos. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (*p-values*) sebesar $0,000 < 0,05$, dengan demikian Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Bos.

2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Bos mempunyai koefisien jalur sebesar 0,295. Hasil ini mengindikasikan bahwa Akuntabilitas memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (*p-values*) sebesar $0,002 < 0,05$, dengan demikian Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Bos.



Sumber : Hasil Olahan SmartPLS, 2025

Gambar 4.2. Hasil *Path Analysis*

4.2.3.2 Uji Simultan (Uji F)

Ketentuannya, jika nilai probabilitas F (sig) pada tabel Anova $< \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak, namun bila nilai probabilitas sig $> 0,05$ maka H_0 diterima. Data yang diperlukan untuk menguji hipotesis di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16 Uji F ANOVA^a

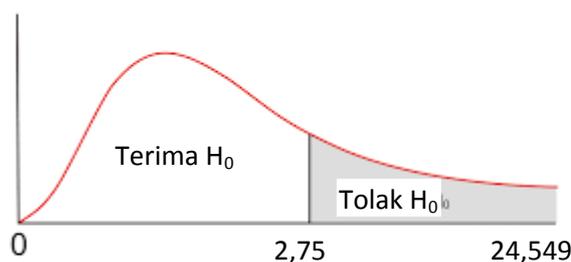
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	251.065	2	125.532	24.545	.000 ^b
	Residual	291.519	57	5.114		
	Total	542.583	59			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana BOS

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

Sumber : Data Penelitian (Diolah 2025)

Nilai F_{hitung} pada tabel di atas adalah 24,549 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,75 dengan sig $0.000 < \alpha = 0,05$ atau $F_{hitung} 24,549 >$ dari $F_{hitung} 2,75$ diperoleh nilai signifikansi $0.000 <$ dari nilai probabilitas 0,05. Menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti Transparansi (X_1) dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Bos (Y) pada taraf $\alpha = 0,05$. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.3 Gambar Uji F

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Bos

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Bos, hal ini dibuktikan dengan hasil uji thitung sebesar 7,360 dengan angka signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan semakin tinggi Transparansi seseorang maka akan semakin tinggi pula Pengelolaan Dana Bos.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah pengadaan barang untuk menunjang fasilitas sekolah. Dalam survei yang dilakukan, 35 responden atau sebanyak 58,3% menyatakan setuju bahwa pembelian barang dengan harga murah lebih signifikan dibandingkan dengan harga mahal, dengan nilai korelasi 0,768. Hal ini menunjukkan bahwa para responden memiliki pandangan bahwa efisiensi biaya dalam pengadaan barang dapat memberikan dampak positif terhadap penggunaan dana BOS secara keseluruhan.

Pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana BOS merupakan faktor kunci dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Berdasarkan hasil survei, 41 responden atau 68,3% menyatakan setuju bahwa pengawasan yang ketat diperlukan dalam pengelolaan dana BOS, dengan nilai korelasi 0,757. Hal ini menunjukkan bahwa para responden menyadari pentingnya pengawasan dalam mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Hasil survei menunjukkan bahwa 36 responden atau 60% setuju bahwa pengawasan yang dilakukan secara efektif dapat mewujudkan laporan dana BOS yang bersih, dengan nilai korelasi 0,799. Hal ini menunjukkan bahwa para

responden memahami pentingnya pengawasan yang tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga efektif dalam memastikan bahwa laporan penggunaan dana BOS akurat dan transparan.

Transparansi merupakan salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan publik yang mengacu pada keterbukaan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan. Menurut (Grizzle & Pettijohn (2002), transparansi dalam konteks pengelolaan dana publik mencakup aksesibilitas informasi, kejelasan informasi yang disampaikan, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Dalam konteks Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), transparansi menjadi sangat penting karena dana ini bersumber dari anggaran pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pendidikan. Ketika informasi mengenai penggunaan dana BOS disampaikan dengan jelas dan terbuka, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana tersebut.

Pengelolaan Dana BOS adalah proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah. Menurut Permendikbud No. 8 Tahun 2020, dana BOS digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, seperti pembelian alat belajar, pembayaran gaji tenaga pengajar, dan biaya operasional lainnya. Pengelolaan yang baik tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kemampuan pihak sekolah untuk merencanakan dan melaksanakan penggunaan dana secara efektif. Dalam hal ini, pengelolaan dana BOS yang transparan akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

Beberapa faktor yang mendukung transparansi dalam pengelolaan dana BOS antara lain adanya sistem informasi yang baik, pelatihan untuk pengelola

dana, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Menurut Sari (2020), sekolah yang memiliki sistem informasi yang memadai dapat dengan mudah mengakses dan menyajikan laporan penggunaan dana BOS kepada masyarakat. Selain itu, pelatihan bagi pengelola dana dapat meningkatkan pengetahuan mereka mengenai pentingnya transparansi, sehingga mereka lebih berkomitmen untuk menerapkan prinsip tersebut dalam pengelolaan dana.

Dampak positif dari transparansi dalam pengelolaan dana BOS tidak hanya dirasakan oleh pihak sekolah, tetapi juga oleh masyarakat. Ketika masyarakat merasa terlibat dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana, mereka cenderung lebih mendukung kebijakan yang diambil oleh sekolah. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi publik yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik (Fung, 2006). Sebagai contoh, beberapa sekolah yang melibatkan orang tua dalam pengelolaan dana BOS berhasil mengurangi penyimpangan penggunaan dana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Hasil penelitian yang menunjukkan nilai *t*-hitung sebesar 7,360 dengan signifikansi 0,000 mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara transparansi dan pengelolaan dana BOS. Semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan dana, semakin baik pula pengelolaan dana tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bastian, 2018) yang menemukan bahwa sekolah yang menerapkan prinsip transparansi dalam laporan keuangan mereka cenderung memiliki pengelolaan dana yang lebih baik. Misalnya, sekolah-sekolah yang secara rutin mengadakan rapat dengan orang tua murid untuk

membahas penggunaan dana BOS menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan dana dan kepuasan masyarakat.

4.3.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Bos

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Bos, hal ini dibuktikan dengan hasil uji t hitung sebesar 3,133 dengan angka signifikan 0,002. Hasil ini mengindikasikan bahwa Akuntabilitas memiliki peran penting dalam menentukan pengelolaan dana bos.

Salah satu hasil angket yang menunjukkan nilai korelasi tertinggi adalah terkait dengan pengembalian keputusan dalam pengelolaan dana BOS yang telah memenuhi standar etika, nilai-nilai yang berlaku, dan prinsip administrasi yang benar. Dari total responden, sebanyak 32 orang atau 53,3% menyatakan sangat setuju dengan pernyataan ini, yang menunjukkan bahwa mayoritas pihak yang terlibat merasa yakin bahwa keputusan yang diambil dalam pengelolaan dana BOS telah sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Nilai korelasi sebesar 0,778 menunjukkan hubungan yang kuat antara pengembalian keputusan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

Hasil angket yang menunjukkan nilai korelasi signifikan adalah terkait dengan pengajuan anggaran yang selalu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebanyak 34 orang atau 56,7% responden menyatakan setuju dengan pernyataan ini, dengan nilai korelasi 0,756. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa pengajuan anggaran di sekolah-sekolah di Kecamatan Sei Rampah telah mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Hasil angket berikutnya menunjukkan nilai korelasi yang signifikan adalah tentang pemberlakuan peraturan yang tegas terhadap setiap penyimpangan

dalam penyusunan anggaran dana BOS. Sebanyak 34 orang atau 56,7% responden menyatakan setuju dengan pernyataan ini, dengan nilai korelasi 0,756. Hal ini menunjukkan bahwa banyak responden merasa bahwa adanya peraturan yang tegas dapat mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS.

Akuntabilitas dalam konteks pengelolaan dana pendidikan, seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), merujuk pada kewajiban para pengelola untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak sekolah itu sendiri. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2017), akuntabilitas mencakup transparansi, kejujuran, dan integritas dalam pengelolaan dana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan. Misalnya, penelitian oleh (Supriyanto, 2019) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang menerapkan prinsip akuntabilitas yang baik terbukti mampu mengelola dana BOS dengan lebih baik, sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas.

Pengelolaan Dana BOS adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana yang diberikan pemerintah kepada sekolah untuk mendukung operasional pendidikan. Dana BOS bertujuan untuk mengurangi

beban biaya pendidikan bagi masyarakat dan meningkatkan akses serta kualitas pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020, pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam praktiknya, pengelolaan dana BOS sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan di kalangan pengelola sekolah. Data dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa masih terdapat banyak sekolah yang tidak melaporkan penggunaan dana BOS secara tepat waktu dan akurat. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas pengelola sekolah dalam hal akuntabilitas dan manajemen keuangan agar dana BOS dapat digunakan secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara akuntabilitas dan pengelolaan dana BOS, dengan nilai *t*-hitung sebesar 3,133 dan angka signifikansi 0,002. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan dana BOS, semakin baik pula pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan teori Stewardship yang menyatakan bahwa pengelola yang bertanggung jawab akan lebih cenderung untuk bertindak demi kepentingan pemangku kepentingan (Davis et al., 1997).

Penelitian oleh (Rachmawati, 2020) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan pengelolaan dana BOS cenderung memiliki laporan penggunaan dana yang lebih transparan dan

akuntabel. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas pengelola.

Akuntabilitas yang tinggi tidak hanya berpengaruh pada pengelolaan dana, tetapi juga pada kualitas pendidikan yang dihasilkan. Penelitian oleh (Nurhayati, 2021) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang memiliki sistem akuntabilitas yang baik mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Misalnya, dengan adanya laporan keuangan yang transparan, pihak sekolah dapat lebih mudah mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, seperti peningkatan fasilitas belajar atau pelatihan guru.

4.3.2. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Bos

Nilai F_{hitung} pada tabel di atas adalah 19,952 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,75 dengan $sig\ 0.000 < \alpha = 0,05$ atau $F_{tabel}\ 24.545 >$ dari $F_{hitung}\ 2,75$ diperoleh nilai signifikansi $0.000 <$ dari nilai probabilitas 0,05. Menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti Transparansi (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Bos (Y) pada taraf $\alpha = 0,05$.

Analisis terhadap hasil survei menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan yang signifikan di antara responden mengenai pengelolaan dana BOS di sekolah. Pertama, sebagian besar responden setuju bahwa sekolah selalu menyampaikan laporan penggunaan dana BOS secara tepat waktu. Hal ini mencerminkan komitmen sekolah terhadap transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan publik. Kedua, responden juga menunjukkan kesepakatan yang tinggi terhadap praktik evaluasi pengelolaan dana

BOS, yang menandakan bahwa sekolah menyadari pentingnya evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana.

Keterlibatan guru dan komite sekolah dalam evaluasi pengelolaan dana BOS juga menunjukkan adanya upaya untuk mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak. Meskipun masih ada tantangan dalam pelaksanaan, seperti kurangnya sumber daya dan partisipasi yang tidak merata, hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami pentingnya keterlibatan dalam pengelolaan dana BOS.

Kesimpulannya, pengelolaan dana BOS yang baik memerlukan kerjasama antara sekolah, guru, komite sekolah, dan pihak terkait lainnya. Dengan meningkatkan transparansi, melakukan evaluasi secara rutin, dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan pengelolaan dana BOS dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi pendidikan di Indonesia. Upaya ini perlu didukung oleh kebijakan yang jelas dan pelatihan bagi sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan, khususnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), merujuk pada keterbukaan informasi dan kejelasan dalam penggunaan dana tersebut. Menurut (Grindle, 2004), transparansi adalah elemen kunci dalam meningkatkan akuntabilitas publik dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan Dana BOS, transparansi mencakup penyampaian informasi mengenai alokasi, penggunaan, dan laporan pertanggungjawaban dana secara jelas dan mudah diakses oleh publik.

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi individu atau organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Menurut Mulgan (2000), akuntabilitas dalam sektor publik melibatkan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan sumber daya publik. Dalam pengelolaan Dana BOS, akuntabilitas mencakup aspek-aspek seperti pelaporan yang tepat waktu, audit yang transparan, dan mekanisme umpan balik dari masyarakat terkait penggunaan dana.

Pengelolaan Dana BOS merupakan proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2016, Dana BOS digunakan untuk mendukung biaya operasional sekolah, termasuk pembelian bahan ajar dan pembayaran gaji guru tidak tetap. Pengelolaan yang baik dari dana ini sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Teori yang ada menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas saling berkaitan dan dapat mempengaruhi pengelolaan Dana BOS. Penelitian oleh (Hossain, 2016) menunjukkan bahwa institusi pendidikan yang menerapkan transparansi yang tinggi cenderung memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih baik, yang pada gilirannya berdampak positif pada pengelolaan dana. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi penggunaan dana, sehingga mendorong pihak sekolah untuk bertanggung jawab atas setiap pengeluaran.

Hubungan Simultan Antara Transparansi dan Akuntabilitas Analisis regresi menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara

simultan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengelolaan Dana BOS. Hasil Fhitung sebesar 19,952 dengan Ftabel 2,75 menunjukkan bahwa model yang digunakan valid dan dapat diandalkan. Dengan nilai signifikan 0,000, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel ini saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pengelola dana.

Berdasarkan hasil analisis, transparansi terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana BOS. Data menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang secara aktif menginformasikan penggunaan dana kepada masyarakat memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dari orang tua siswa (Rizal, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong sekolah untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan dana.

Akuntabilitas juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan Dana BOS. Penelitian oleh (Sari, 2019) menemukan bahwa sekolah yang memiliki sistem pelaporan yang baik dan audit yang rutin cenderung lebih efisien dalam menggunakan dana. Hal ini terjadi karena adanya tekanan dari pihak luar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana, yang mendorong manajemen sekolah untuk lebih berhati-hati dalam pengeluaran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar di Kecamatan Sei Rampah. Hal ini menunjukkan sekolah yang menerapkan prinsip transparansi dalam laporan keuangan mereka cenderung memiliki pengelolaan dana yang lebih baik
2. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar di Kecamatan Sei Rampah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan dana BOS, semakin baik pula pengelolaannya
3. Transparansi dan Akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar di Kecamatan Sei Rampah. Bahwa transparansi dan akuntabilitas saling berkaitan dan dapat mempengaruhi pengelolaan Dana BOS.

5.2 Saran

1. Disarankan agar pihak sekolah menyelenggarakan pelatihan dan workshop mengenai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel bagi seluruh pengelola dana BOS, termasuk kepala sekolah dan bendahara.
2. Sekolah perlu mengembangkan sistem informasi yang memadai untuk menyajikan laporan penggunaan dana BOS secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

3. Diharapkan agar pihak sekolah melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pengawasan pengelolaan dana BOS, sehingga dapat menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi.
4. Melakukan audit rutin terhadap penggunaan dana BOS untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Serta memastikan bahwa laporan penggunaan dana BOS disusun dan disampaikan secara tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah dan orang tua siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, A., Tanjung., N. M., & M. Husni, M. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Orang Tua Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Dan SMP. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(1), 994–995.
- Adisasmita, R. (2011a). Manajemen Pemerintah Daerah. *Penerbit Graha Ilmu*.
- Adisasmita, R. (2011b). Manajemen Pemerintah Daerah. *Graha Ilmu*.
- Adisasmita, R. (2011c). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Graha ilmu*.
- Arikunto, S. (2018). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. *Rineka Cipta*.
- Asmani, J. M. (2012). Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah. *Diva Press*.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Akrua*, 1(1), 334–344.
- Sari, E. N., Sihotang, S., & Irfan (2024). Pengaruh Penerapan Aplikasi Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (ARKAS) Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Di Moderasi Oleh Komitmen Pimpinan Di SMA Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*.
- Fahmi, I. (2014). Analisa Kinerja Keuangan. *Alfabeta*.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (8th ed.). *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ghozali, I. & H. L. (2015). Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi Dengan Program Smart PLS 3.0. *Universitas Diponegoro Semarang*.
- Hanum, Z. (2019). Analisis Fungsi Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengawasan Pada Perum Perumas Reginal 1 Medan. Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi. *UMSU*.
- Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara.
- Hayati, i., & Astuty, W. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Pengelolaan ZAKat Dengan Literasi Zakat Sebagai Variabel Intervening Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat. *Economis Reviews Journal*, 3(2), 1111-1126.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Pasa1 1 Ayat (1) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah reguler. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

- Irfan., Manurung, S., & Hani, S. (2024). *Metode Penelitian Bisnis*. UMSU Press.
- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. UMSU Press.
- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2015a). *Metode Penelitian Bisnis : Konsep & Aplikasi*. UMSU Press.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2015b). *Metodologi Penelitian Bisnis*. UMSU PRESS.
- Krina, P., & Loina, L. (2003). *Indikator & Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Kristianten. (2014). *Akuntabilitas Kinerja Berkonsep Value for Money Pada Instansi Pemerintah*. Ekonisia.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Minarti, S. (2011). *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Ar-Ruzz Media.
- Moekizat. (2014). *Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja*. Pioner Jaya.
- Mursyidi. (2015). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Cetakan Kedua*. Refika Aditama.
- Nico, A. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Government*. Bayumedia Publishing.
- Nurhayati. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Kolaka Timur. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 8(3), 1–10.
- Nuryadin, A. (2012). *Manajemen Perusahaan*. LaksBang PRESSindo.
- Pratama, A. B. (2012). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Pustaka Media Press.
- Rambe, I. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Di Kecamatan Percut Sei Tuan. Repository UMSU.
- Sanjaya, A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Soppeng). In *E-Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–9.
- Saragih, F. (2021). Peran Perangkat Desa Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Repository UMSU.

- Sarjana, & Yuni, P. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) (Studi Kasus Pada SMP Negeri 2 Slogohimo K. *JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi)*, 12(2), 1–15.
- Sari, M. (2021). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Desa Kecamatan Beringin*. Repository UMSU.
- Sasangka., S. &. (2014). *Pengantar Bisnis*. Alfabeta.
- Shilvia, H. N. (2021). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Karakteristik Pengelola Keuangan Sekolah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus Pada Seluruh SMP/MTsN Di Kabupaten Aceh Tenggara)*. Skripsi: UINSU.
- Sudarman, D., & K. . (2015). *Profesi Kependidikan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan. In *Alfabeta*.
- Suharizar, J., & M. (2021). *Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Selayar*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. PUSTAKA BARU PRESS.
- Sutarno. (2006). *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktis*. Sagung Set.
- Tanjung, A. H. (2011). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. BPFE UGM.
- Torang, S. (2016). *Filsafat Ilmu : Organisasi dan Manajemen*. Alfabeta.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Mandarmaju.

LAMPIRAN

1. Transparansi (X1)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
Kejelasan dan kelengkapan informasi						
1	Hasil kegiatan yang disampaikan kepada wali murid tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan (Disampaikan semestinya saja, tetapi terkait pengelolaan dana BOS yang sebenarnya hanya pihak internal yang boleh tau).					
2	Informasi mengenai prosedur, jumlah nominal dana BOS yang diterima, anggaran, dan pertanggungjawaban dana BOS tersedia dipapan informasi atau website sekolah.					
Kesediaan dan aksesibilitas dokumen						
3	Akses untuk memperoleh dokumen tentang penggunaan dan penyaluran dana BOS bisa didapat setiap waktu (tersedia dipapan informasi/webside sekolah)					
4	Kesediaan dokumen tentang penggunaan dana BOS bisa didapat setiap waktu.					
Kerangka regulasi yang menjamin transparansi						
5	Tidak ada mekanisme pengaduan/sanksi bagi pihak yang melanggar peraturan dalam pengelolaan dana BOS.					
6	Perencanaan dana BOS dan hasil kegiatan diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan sekolah bukan keinginan sekolah.					
Keterbukaan proses						
7	Pengelolaan dana BOS selalu disajikan secara terbuka.					
8	Pengelolaan dana BOS secara terbuka untuk mencapai tujuan.					

2. Akuntabilitas (X2)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
Pengajuan anggaran berdasarkan aturan						
1	Pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana BOS sudah memenuhi standar etika, nilai-nilai yang berlaku, dan prinsip administrasi yang benar.					
2	Pengajuan anggaran selalu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.					
Pelaksanaan belanja dengan prinsip efektif serta efisien						
3	Pengelolaan dana BOS dilakukan secara ekonomis dan efisien.					
4	Didalam pengadaan barang untuk menunjang fasilitas sekolah (terlepas dari kualitas suatu barang), pembelian barang dengan harga murah lebih signifikan dibandingkan dengan harga mahal					
Melakukan pengawasan						
5	Dilakukannya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana BOS.					
6	Pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan laporan dana BOS yang bersih.					
Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS)						
7	Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan RKAS dalam dana BOS sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran					
8	Diberlakukan suatu peraturan yang tegas terhadap setiap penyimpangan dalam penyusunan anggaran dana BOS.					

3. Pengelolaan Dana BOS

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
Taat aturan						
1	Pihak pengelola dana BOS telah mengikuti prosedur.					
2	Dalam penyusunan laporan dana BOS dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.					
Perencanaan						
3	Sekolah menyusun perencanaan penggunaan dana BOS sesuai kebutuhan prioritas sekolah					
4	Penyusunan rencana penggunaan dana BOS melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan pihak terkait lainnya					
Pengawasan						
5	Sekolah memiliki mekanisme pengawasan yang jelas terhadap penggunaan dana BOS					
6	Jika ditemukan penyimpangan dalam pengawasan pengelolaan dana BOS, tindakan korektif segera dilakukan					
Pertanggungjawaban						
7	Kepala sekolah dan bendahara bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana BOS					
8	Sekolah selalu menyampaikan laporan penggunaan dana BOS secara tepat waktu kepada pihak terkait					
Evaluasi						
9	Sekolah secara rutin melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan efektivitasnya					
10	Guru serta komite sekolah dilibatkan dalam mengevaluasi pengelolaan dana BOS					